

IX. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Informasi Umum tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai berikut Pencegahan, yang mengandung makna menghambat atau membatasi tumbuh kembangnya masalah kesejahteraan sosial, Rehabilitasi sosial, suatu proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial yang memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat,

Perlindungan, sebagai wujud dari jaminan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi setiap warga Negara dari tindak kekerasan dan atau perlakuan salah, sesuai dengan harkat dan martabat manusia,

Pemberdayaan dan Pengembangan, yang berkaitan dengan upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan berikut lingkungannya, serta peningkatan kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab sosial untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan;

Misi utama dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimaksudkan selain untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, yang lebih penting adalah keinginan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, akuntabilitas dan transparansi menjadi sangat dominan dalam pelaksanaan program yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Maksud dari pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD melalui Laporan Keuangan ini adalah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan kesejahteraan sosial kepada masyarakat untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan

oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur selama satu periode pelaporan. Pertanggungjawaban ini juga bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pelayanan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial, melainkan untuk melaksanakan asas efisiensi, efektifitas, dan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*) adalah penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan dengan peraturan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pelaporan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun ini disusun dengan tujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik sebagai perwujudan asas transparansi, demokrasi dan akuntabilitas dalam rangka perwujudan Good Governance.

Penyusunan APBD didasarkan pada pendekatan kinerja, yaitu suatu system anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Dalam pendekatan kinerja, maka usulan program, kegiatan dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya melalui rasionalisasi dan sinkronisasi program, dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memuat hal-hal dibawah ini agar dapat dievaluasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi pengalokasian anggaran :

- a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran ;
- b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan ;

- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur serta hasil-hasil yang telah dicapai ;
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mendanain seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya ;
- e) Sebagai pertanggungjawaban Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Provinsi atas pelaksanaan anggaran yang diberikan ;
- f) Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Provinsi.

3. Landasan Hukum Pelaporan Keuangan;

Pelaporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;

Adapun sistematika penulisan tentang Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan Gambaran Umum dan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan serta Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

Menguraikan situasi ekonomi makro di daerah setempat yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan program, dasar pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebijakan keuangan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan SKPD yang menggunakan dana APBD dalam tahun berjalan.

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Bab V : Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)

Bab VI : Informassi Tambahan Lainnya

Bab VII : Penutup

B. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN

1. Ekonomi Makro;

Kebijakan keuangan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mempunyai kaitan secara tidak langsung dengan perkembangan ekonomi makro di Jawa Timur baik dari sektor riil ataupun moneter. Pembangunan ekonomi sektor riil dapat dilihat dari perkembangan investasi, aktivitas perdagangan, jumlah dan pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja, pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan tingkat kemiskinan menjadi pertimbangan yang cukup signifikan bagi perangkat SKPD, bagi penyusunan program dan kegiatan yang dapat memberi kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini peningkatan kesejahteraan sosial di Jawa Timur.

Perkembangan ekonomi makro dari segi moneter seperti tingkat inflasi juga ikut menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD karena ikut menentukan kenaikan jumlah anggaran.

2. Kebijakan Fiskal/Keuangan;

Kebijakan keuangan yang diterapkan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 tetap mengacu pada Dokumen Perencanaan Jawa Timur, yaitu Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2021, dimana prioritas pembangunan yang terkait dengan Agenda dan RJPMD adalah percepatan tahun 2017 – 2022 yaitu : Memperluas lapangan kerja , peningkatan

efektivitas penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial Rakyat.

C. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

1. Indikator/Target Kinerja Keuangan;

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Indikator Kinerja, indikator tersebut adalah :

- a. Masukan (input), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan.
- b. Keluaran (Output) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (Outcome) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- d. Manfaat (Benefit) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dari hasil.
- e. Dampak (Impact) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap makro yang ingin dicapai dari manfaat.

2. Pencapaian Target Kinerja Keuangan;

Selama tahun 2017 pencapaian kinerja target keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur belum tercapai seluruhnya, walaupun hampir seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan tepat sasaran, terjadi perubahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 berupa kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Secara umum program dan kegiatan lain berjalan dengan baik dan sukses, walaupun terdapat beberapa kegiatan yang berjalan kurang baik, hal tersebut disebabkan oleh kendala sumberdaya manusia yang terbatas sehingga proses pelaksanaannya tidak maksimal. Evaluasi dan perbaikan terus dilakukan agar kinerja organisasi dan peran serta masyarakat dapat berjalan dengan maksimal.

3. Hambatan dan Kendala;

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa hambatan dan kendala yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan maksimal, diantaranya adalah :

- Adanya perubahan ketentuan pedoman pengadaan barang dan jasa mengakibatkan keraguan dalam penentuan pemaketan karena masa transisi pemberlakuan perubahan ketentuan dari Perpres No. 54 th. 2010 ke Perpres No. 70 th. 2012 sehingga menghambat percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa..
- Perencanaan program, kegiatan dan keuangan yang kurang optimal disebabkan oleh terbatasnya waktu penyusunan dan pengajuan anggaran menyebabkan mengalami hambatan pelaksanaan anggaran.
- Sumber Daya Manusia yang terbatas menyebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan maksimal karena kurangnya tenaga pelaksana.

4. Solusi dan Saran;

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa solusi yaitu penambahan Sumber Daya Manusia serta perencanaan program lebih baik lagi.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi sebagai Pengguna Anggaran / Barang dengan istilah entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan secara periodik dan melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan.

Asumsi dasar dalam laporan keuangan pemerintah daerah dalam hal ini adalah satuan kerja pemerintah daerah, anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan yang terdiri dari :

- a. Asumsi kemandirian entitas
- b. Asumsi kesinambungan entitas
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Karakteristik prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah ada 4 (empat) karakteristik sebagai berikut :

- a. Relevan

- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Selanjutnya pengakuan dalam akuntansi adalah merupakan proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kegiatan atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian-kejadian atau peristiwa terkait. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dan dapat diestimasi dengan andal.

Berikut ini dijelaskan kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan dari unsur-unsur yang ada dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional sebagai berikut :

a. Pengakuan Pendapatan (LRA)

Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima oleh kas umum daerah. Pendapatan menurut PP. 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Jadi apabila terdapat pendapatan yang dipungut oleh / disetor kepada bendahara penerimaan belum diakui sebagai pendapatan uang tersebut diberlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

b. Pengakuan belanja (LRA)

Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas umum daerah dan telah dipertanggungjawabkan / di SPJ kan serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Dalam manajemen anggaran, pada prinsipnya belanja baru dapat dibayarkan setelah barang/jasa yang telah diterima pemerintah. Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. Pengukuran belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh asset tetap secara fisik. Sedangkan pengeluaran lain sampai memperoleh asset tetap tidak masuk dalam Belanja Modal.

c. Surplus / defisit

Surplus / defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

d. Pengakuan pendapatan (LO)

Pendapatan menurut basis akrual diakui dalam periode tahun anggaran berjalan dan periode sebelumnya pada saat piutang diterbitkan maupun kas diterima oleh kas umum daerah. Pendapatan menurut PP. 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah maupun piutang belum terbayar yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

e. Pengakuan Beban (LO)

Beban menurut basis Akrual, diakui dalam periode tahun anggaran berjalan dan periode sebelumnya pada saat barang/jasa telah diterima. Dalam manajemen anggaran, pada prinsipnya belanja baru dapat dibayarkan setelah barang/jasa yang telah diterima pemerintah. Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. Pengukuran belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh asset tetap secara fisik. Sedangkan pengeluaran lain sampai memperoleh asset tetap tidak masuk dalam Belanja Modal.

Berikut ini dijelaskan kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan dari unsur-unsur yang ada dalam Neraca :

a. Pengakuan Kas

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai tersebut. Pengukuran kas di Bendahara Pengeluaran sebesar nilai dari tunai saldo kas yang menurut catatan fisik berada di Bendahara pengeluaran. Kas disajikan dalam kelompok aset lancar berdasarkan saldo kas yang masih tersimpan di Bendahara pengeluaran yang berasal dari dana UP/GU/TU.

b. Pengakuan Persediaan

Persediaan merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Pada periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik berdasarkan sistem pengelolaan barang di gudang menggunakan metode masuk pertama keluar pertama

(FIFO). Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca SKPD berdasarkan harga rata-rata nilai persediaan

c. Pengakuan aset tetap

Asset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk memperoleh asset, penganggarnya melalui belanja modal. Jadi realisasi belanja modal merupakan tolak ukur untuk menambah asset tetap. Diakui ketika Pemerintah Daerah telah menerima barang yang penganggarnya melalui belanja modal.

2. **Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan**

Yang mendasari laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah menggunakan basis akrual untuk pengakuan pada pendapatan, belanja, beban,serta pengakuan asset, dalam neraca.

Basis Akrual bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kewajiban telah dilakukan, belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan oleh Kas Daerah, serta beban diakui pada saat telah barang/jasa telah diterima.

Sedangkan basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bukan terpaku pada saat diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.

3. **Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Pelaporan Keuangan**

a. Pengukuran Pendapatan (LRA)

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima. Pendapatan mata uang yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat terjadinya pendapatan.

b. Pengukuran Belanja (LRA)

Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Belanja uang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat pengakuan belanja. Pengakuan belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aktiva tetap.

c. Pengukuran Pendapatan (LO)

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan

mata uang yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat terjadinya transaksi pendapatan.

d. Pengukuran Beban (LO)

Pengukuran Beban non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat pengakuan Beban.

e. Pengukuran Aset

Aset tetap diakui ketika pemerintah melakukan pengeluaran kas untuk memperoleh aset yang penganggarnya melalui belanja modal. Jadi realisasi belanja modal merupakan tolak ukur untuk menambah aset tetap. Diakui ketika Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran kas untuk memperoleh aset yang penganggarnya melalui belanja modal.

Aset tetap yang tidak diketahui perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian aset tetap yang berdasarkan dari hibah yang tidak diketahui perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan dikaitkan dengan SAP pada prinsipnya tidak mengandung permasalahan yang menyimpang dan sulit untuk diterapkan. Pilihan yang telah diambil sesuai dengan penyusunan rencana anggaran yang [dituangkan dalam DPA Provinsi Jawa Timur yang distandart dalam Permendagri No. 13 Th 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005.](#)

E. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan

1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD dikonversi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang meliputi Pendapatan dan Belanja.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 7.956.337.777,50** apabila dihadapkan dengan target pendapatan sebesar Rp. **118.000.000,00** terdapat pelampauan realisasi pendapatan sebesar Rp. **7.838.337.777,50** atau terealisasi sebesar **6.742,66 %**. Pendapatan terdiri dari (i) Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar **Rp. 143.423.000,00** (ii) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. **7.812.914.777,50**.

URAIAN	RENCANA PAD	REALISASI PAD
UPT PSBR Jombang	Rp. 15.000.000,00	Rp. 500.000,00
UPT PPSPA Batu	Rp. 25.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
UPT PTKS Malang	Rp. 25.000.000,00	Rp. 34.100.000,00
UPT RSBN Malang	-	-
UPT PSBR Blitar	Rp. 7.500.000,00	-
Dinas Sosial Prov. Jatim	Rp. 42.500.000,00	Rp. 22.200.000,00
Lain-Lain	-	Rp. 84.623.000,00
TOTAL	Rp. 118.000.000,00	Rp. 143.423.000,00

E.1. Tabel Rencana dan Realisasi PAD

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. **376.194.038.681,00**. Apabila Realisasi Belanja dihadapkan pada target belanja sebesar **Rp. 406.262.656.400,00** terdapat penghematan atau sebab lainnya sebesar Rp. **30.068.617.719,00** atau terealisasi **92,60 %** Realisasi Belanja terdiri dari (i). Belanja Operasi sebesar Rp. **361.840.665.485,00**; (ii). Belanja Modal sebesar Rp. **14.353.373.196,00**.

1.a BELANJA OPERASI

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 361.840.665.485,00** dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. **390.382.140.803,00** atau **92.69 %**. Realisasinya diperoleh dari Belanja Pegawai Rp. 145.151.468.461,00, Belanja Barang dan Jasa Rp. 127.113.113.957,00 dan Belanja Bantuan Sosial Rp. 89.576.083.067,00.

1.b BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2021 **Rp. 14.353.373.196,00** Realisasinya diperoleh dari :

1.b.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 6.814.002.580,00** atau **97,39 %**, dari Anggaran yang direncanakan sebesar **Rp. 6.996.707.057,00**.

1.b.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 6.651.003.516,00** atau **83,23 %**, dari Anggaran yang direncanakan sebesar **Rp. 7.990.658.540,00**.

1.b.3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigas TA 2021 adalah sebesar **Rp. 789.862.100,00** atau **99,59 %** dari jumlah yang dianggarkan dalam PAPBD sebesar **Rp. 793.150.000,00**.

1.b.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 adalah sebesar **Rp. 98.505.000,00** atau **98,51 %** dari jumlah yang dianggarkan dalam PAPBD sebesar **Rp. 100.000.000,00**.

1.c. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja TA 2021 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Defisit Anggaran TA 2021 adalah sebesar **Rp 368.237.700.903,50** atau **90,67 %**.

2. Penjelasan Umum Laporan Operasional (LO)

Laporan Opeasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan perbandingan yang meliputi Pendapatan dan Beban berbasis Akrual.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dinas Sosial

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Ref.	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL						
1	PENDAPATAN DAERAH-LO		7.992.837.777,50	273.807.720,96	7.719.030.056,54	2819,14
11	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		7.992.837.777,50	273.807.720,96	7.719.030.056,54	2819,14
1102	Retribusi Daerah-LO		143.423.000,00	126.477.999,96	16.945.000,04	13,40
1104	Lain-lain PAD yang Sah-LO		7.849.414.777,50	147.329.721,00	7.702.085.056,50	5227,79
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH-LO			7.992.837.777,50	273.807.720,96	7.719.030.056,54	2819,14
2	BEBAN DAERAH		374.552.812.728,35	298.125.939.120,39	76.426.873.607,96	25,64
21	BEBAN OPERASI		362.207.758.809,35	286.969.925.183,39	75.237.833.625,96	26,22
2101	Beban Pegawai		145.151.468.461,00	177.656.781.007,00	(32.505.312.546,00)	-18,30
2102	Beban Barang dan Jasa		127.480.207.281,35	106.051.616.622,39	21.428.590.658,96	20,21
2106	Beban Bantuan Sosial		89.576.083.067,00	3.261.527.554,00	86.314.555.513,00	2646,45
22	Beban Penyusutan dan Amortisasi		12.345.053.919,00	11.156.013.937,00	1.189.039.982,00	10,66
2201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		8.463.663.696,00	7.300.380.223,00	1.163.283.473,00	15,93
2202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		3.448.837.163,00	3.403.934.234,00	44.902.929,00	1,32
2203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		298.638.405,00	263.233.839,00	35.404.566,00	13,45
2204	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		2.056.420,00	100.142.990,00	(98.086.570,00)	-97,95
2205	Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00	5.050.948,00	(5.050.948,00)	-100,00
2206	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		131.858.235,00	83.271.703,00	48.586.532,00	58,35
24	BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN DAERAH			374.552.812.728,35	298.125.939.120,39	76.426.873.607,96	25,64
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL			(366.559.974.950,85)	(297.852.131.399,43)	(68.707.843.551,42)	23,07
3	SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	(179.916.690,00)	179.916.690,00	-100,00
31	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
3101	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
3102	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
32	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		0,00	179.916.690,00	(179.916.690,00)	-100,00
3201	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0,00	179.916.690,00	(179.916.690,00)	-100,00
3202	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL			0,00	(179.916.690,00)	179.916.690,00	-100,00
4	POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
41	PENDAPATAN LUAR BIASA-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
4101	Pendapatan Luar Biasa-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
42	BEBAN LUAR BIASA-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
4201	Beban Luar Biasa-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA			0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT - LO			(366.559.974.950,85)	(298.032.048.089,43)	(68.527.926.861,42)	22,99

E.2. Tabel Laporan Operasional (LO)

Pendapatan LO Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 7.992.837.777,50** dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 273.807.720,96** Ada kenaikan sebesar **Rp. 7.719.030.056,54** atau sebesar **2819,14 %** dikarenakan pada tahun 2021 ada pengembalian belanja penanganan covid tahun 2020.

Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 145.151.468.461,00** dan bila dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 177.656.781.007,00**. Ada penurunan sebesar **18,30%**

Beban Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 127.480.207.281,35** dan bila dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 106.051.616.622,39**. Ada Kenaikan sebesar **20,21 %**

Beban Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 89.576.083.067,00** dan bila dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 3.261.527.554,00** Ada Kenaikan sebesar **2646,45 %**

Beban Penyusutan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 12.345.053.919,00** dan bila dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 11.156.013.937,00**. Ada kenaikan sebesar 10,66%.

3. Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur **Tahun Anggaran 2021 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / PENYESUAIAN EKUITAS** sebesar **(Rp 8.009.877.163,50)** terjadi karena Penyesuaian saldo Kas dan Rekening di Bendahara BTT Rp. 7.747.898.310,50, reklasifikasi akibat penerapan Permendagri No. 108 Th. 2016 – Kodefikasi BMD, dan Pengalihan Status Penggunaan ke Biro Umum.

4. Penjelasan Umum Neraca

Rincian Asset

a. Penjelasan Persediaan

Persediaan merupakan asset berwujud berupa barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan

kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan antara lain terdiri dari Persediaan Alat Tulis Kantor, Alat Listrik, Alat Rumah Tangga Pakai Habis, Alat Olah Raga Pakai Habis, Cetakan dan lain-lain.

Jumlah Persediaan yang berada di Gudang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan UPT pada awal Tahun 2020 sebesar **Rp. 370.141.750,00** terjadi **mutasi bertambah** senilai **Rp. 476.302.200,00** dan telah terjadi **mutasi berkurang** senilai **Rp. 461.937.740,00** dikarenakan telah dimanfaatkan/dialurkan dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan UPT, sehingga **keadaan akhir** barang persediaan sebesar **Rp. 384.506.210,00** dengan rincian Kelompok/Bidang Barang sebagai berikut :

NO	KODE AKUN	URAIAN	NILAI
1	111201030001	Alat Tulis Kantor	106.195.045,00
2	111201030002	Kertas dan Cover	11.144.375,00
3	111201030003	Bahan Cetak	39.476.525,00
4	111201030006	Bahan Komputer	55.642.400,00
5	111201030007	Perabot Kantor	58.432.440,00
6	111201030008	Alat Listrik	59.153.050,00
7	11120103000919	Pakaian Olahraga	3.584.900,00
8	111201030011	Perlengkapan Olahraga	19.658.100,00
9	111201040001	Obat-Obatan	1.667.050,00
10	1112010500020304	Bansos Barang ke Lembaga Non Pemerintah	29.552.325,00
Total			384.506.210,00

b. Penjelasan Aset Tetap

Asset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur **Jumlah Nilai Aset Tetap Keadaan Awal Tahun Anggaran 2021** sebesar **Rp. 950.668.827.600,00** memperoleh **Penambahan** sebesar **Rp. 21.118.057.012,00** dan **Pengurangan** sebesar **Rp. 7.783.308.566,00**, sehingga **Keadaan Akhir** sebesar **Rp. 964.003.576.046,00** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Keadaan Awal Bidang Tanah senilai **Rp. 717.173.760.150,00** mengalami mutasi **kurang** ke Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur senilai **Rp. 641.546.400,00** berupa Tanah dengan luas 256 m² yang beralamatkan di Pucang Rinenggo No.51 Surabaya sehingga Keadaan Akhir senilai **Rp. 716.532.213.750,00**.

- 2) Keadaan Awal Bidang Alat–Alat Besar senilai **Rp. 1.357.281.425,00** mengalami mutasi **tambah** senilai **Rp. 142.520.700**, sehingga Keadaan Akhir senilai **Rp. 1.499.802.125,00**
- 3) Keadaan Awal Bidang Alat–Alat Angkutan senilai **Rp. 21.176.578.970,00**. memperoleh **tambahan** senilai **Rp. 725.270.150**, sehingga Keadaan Akhir Bidang Alat–Alat Angkutan senilai **Rp. 21.901.849.120,00**.
- 4) Keadaan Awal Bidang Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai **Rp. 3.772.967.501,00**. memperoleh **tambahan** sebesar **Rp. 84.891.150**. Terdapat **pengurangan** sebesar **Rp. 13.917.000**, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Bengkel dan Alat Ukur** senilai **Rp. 3.843.941.651,00**.
- 5) Keadaan Awal Bidang Alat Pertanian senilai **Rp. 94.479.400,00** terdapat **mutasi tambah** sebesar **Rp. 3.168.000,00** berupa 2 (dua) unit Hand Sprayer tangan dan **tidak terdapat pengurangan** mutasi aset sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Pertanian** senilai **Rp. 97.647.400,00**.
- 6) Keadaan Awal Bidang Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai **Rp. 53.930.347.240,00**. Terdapat **mutasi tambah** senilai **Rp. 4.586.816.800,00** yang berada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan UPT dan **terdapat pengurangan** senilai **Rp. 63.201.050,00**, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Kantor dan Rumah Tangga** senilai **Rp. 58.453.962.990,00**.
- 7) Keadaan Awal Bidang Alat Studio dan Alat Komunikasi senilai **8.063.920.936,00**. memperoleh **mutasi tambah** dari Realisasi Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi senilai **Rp. 702.810.600,00**, **terdapat pengurangan** sebesar **Rp. 1.522.400,00**, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Studio dan Alat Komunikasi** senilai **Rp. 8.765.209.136,00**.
- 8) Keadaan Awal Bidang Alat Kedokteran senilai **Rp. 481.438.100,00** terdapat **mutasi tambah** senilai **Rp. 337.585.180,00** dan **terdapat pengurangan** sebesar **Rp. 1.793.000,00**, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Kedokteran** senilai **Rp. 817.230.280,00**.
- 9) Keadaan Awal Bidang Alat Laboratorium senilai **Rp. 397.371.950,00** terdapat **mutasi tambah** senilai **Rp. 3.022.000,00** dan **tidak terdapat mutasi kurang**, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Laboratorium** senilai **Rp. 400.393.950,00**
- 10) Keadaan Awal Bidang Bangunan Gedung senilai **Rp. 132.570.663.042,00** memperoleh tambahan berasal **mutasi tambah** **Rp. 6.651.003.516,00**, terdapat **mutasi kurang** senilai **Rp. 377.520.000,00** sehingga **keadaan akhir Bidang Bangunan Gedung** senilai **Rp. 138.844.146.558,00**.

- 11) Keadaan Awal Bidang Monumen senilai **Rp. 8.313.000,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Bidang Monumen** senilai **Rp. 8.313.000,00**.
- 12) Keadaan Awal Bidang Bangunan Air Irigasi senilai **Rp. 8.132.502.701,00** **terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 137.170.000,00** yang berada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan UPT **Keadaan Akhir Bidang Bangunan Air Irigasi** senilai **Rp. 8.269.672.701,00**
- 13) Keadaan Awal Bidang Instalasi senilai **Rp. 2.194.068.350,00** **terdapat mutasi tambah** senilai **Rp. 550.727.700,00**, yang berada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan UPT, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Instalasi** senilai **Rp. 2.744.796.050,00**.
- 14) Keadaan Awal Bidang Jaringan senilai **Rp. 0,00**. Tidak mengalami mutasi kurang dan mutasi tambah sehingga **Keadaan Akhir Bidang Jaringan** senilai **Rp. 0,00**
- 15) Keadaan Awal Bidang Buku dan Perpustakaan senilai **Rp. 146.725.225,00** tidak **terdapat mutasi tambah** dan tidak **terdapat pengurangan** sehingga **Keadaan Akhir Bidang Buku dan Perpustakaan** senilai **Rp. 146.725.225,00**.
- 16) Keadaan Awal Bidang Barang Bercorak Kebudayaan senilai **Rp. 1.036.271.450,00** **tidak terdapat mutasi tambah**, terdapat mutasi kurang senilai **Rp. 453.055.750,00** sehingga **Keadaan Akhir Bidang Barang Bercorak Kebudayaan** senilai **Rp. 583.215.700,00**
- 17) Keadaan Awal Bidang Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai **Rp. 132.138.160,00** **tidak mengalami mutasi bertambah** senilai Sehingga **keadaan akhir Bidang Konstruksi Dalam Pengerjaan** senilai **Rp. 132.138.160,00**.

c. Penjelasan Aset Lainnya

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur **Jumlah Nilai Aset Lainnya Keadaan Awal Tahun Anggaran 2021** sebesar **Rp. 2.754.337.328,00** **tidak terdapat penambahan** dan **tidak terdapat pengurangan** sehingga **Keadaan Akhir Aset Lainnya** sebesar **Rp2.754.337.328,00** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Keadaan Awal Bidang Alat – Alat Besar senilai **Rp. 0,00**. Tidak terjadi mutasi tambah dan kurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat – Alat Besar** senilai **Rp. 0,00**.
- 2) Keadaan Awal Bidang Alat–Alat Angkutan senilai **Rp. 854.325.100,00** memperoleh **tidak memperoleh tambahan** dilingkungan Dinas Sosial

Provinsi Jawa Timur, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat–Alat Angkutan** senilai **Rp. 854.325.100,00**.

- 3) Keadaan Awal Bidang Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai **Rp. 148.454.000,00**. **Tidak mengalami mutasi tambah** sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Bengkel dan Alat Ukur** senilai **Rp. 148.454.000,00**.
- 4) Keadaan Awal Bidang Alat Pertanian senilai **Rp. 150.000,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Pertanian** senilai **Rp. 150.000,00**.
- 5) Keadaan Awal Bidang Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai **Rp. 1.057.689.699,00**. **Tidak mengalami mutasi tambah dan tidak terdapat pengurangan**, sehingga **keadaan akhir Bidang Alat Kantor dan Rumah Tangga** senilai **Rp. 1.057.689.699,00**.
- 6) Keadaan Awal Bidang Alat Studio dan Alat Komunikasi senilai **Rp. 237.623.929,00**. **Tidak mengalami mutasi tambah** sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Studio dan Alat Komunikasi** senilai **Rp. 237.623.929,00**.
- 7) Keadaan Awal Bidang Alat Kedokteran senilai **Rp. 1.575.000,00** tidak mengalami mutasi tambah dan kurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Kedokteran** senilai **Rp. 1.575.000,00**.
- 8) Keadaan Awal Bidang Alat Laboratorium senilai **Rp. 15.078.000,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan kurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Laboratorium** senilai **Rp. 15.078.000,00**.
- 9) Keadaan Awal Bidang Bangunan Gedung senilai **Rp. 0,00**. Tidak terjadi mutasi tambah dan kurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Bangunan Gedung** senilai **Rp. 0,00**.
- 10) Keadaan Awal Bidang Monumen senilai **Rp. 0,00**. tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Monumen** senilai **Rp. 0,00**
- 11) Keadaan Awal Bidang Jalan dan Jembatan senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Jalan dan Jembatan** senilai **Rp. 0,00**.
- 12) Keadaan Awal Bidang Bangunan Air Irigasi senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Bangunan Air Irigasi** senilai **Rp. 0,00**.
- 13) Keadaan Awal Bidang Instalasi senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Instalasi** senilai **Rp. 0,00**.

- 14) Keadaan Awal Bidang Jaringan senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Bangunan Jaringan** senilai **Rp. 0,00**.
- 15) Keadaan Awal Bidang Buku perpustakaan senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Buku perpustakaan** senilai **Rp. 0,00**.
- 16) Keadaan Awal Bidang Barang Bercorak Kebudayaan senilai **Rp. 24.975.500,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Barang Bercorak Kebudayaan** senilai **Rp. 24.975.500,00**.
- 17) Keadaan Awal Bidang Hewan ternak serta tanaman senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Hewan Ternak Serta Tanaman** senilai **Rp. 0,00**.
- 18) Keadaan Awal Bidang Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang Sehingga **keadaan akhir Bidang Konstruksi Dalam Pengerjaan** senilai **Rp. 0,00**
- 19) Keadaan Awal Bidang Golongan Aset Tak Berwujud berupa Software senilai **Rp. 334.116.100,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Golongan Aset Tak Berwujud** berupa Software senilai **Rp. 334.116.100,00**.
- 20) Keadaan Awal Bidang Golongan Aset Tak Berwujud berupa Hasil Kajian/Perencanaan senilai **Rp. 79.750.000,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Golongan Aset Tak Berwujud** berupa Hasil Kajian/Perencanaan senilai **Rp. 79.750.000,00**.

d. Penjelasan Aset Tak Berwujud

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur **Jumlah Nilai Aset Tak Berwujud Keadaan Awal Tahun Anggaran 2021** sebesar **Rp. 1.094.857.500,00** **terdapat penambahan** senilai **Rp. 98.505.000,00**, tidak terdapat pengurangan, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Aset Tak Berwujud** sebesar **Rp. 1.193.362.500,00**.

e. Penjelasan Aset Ekstra Komptabel

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur **Jumlah Nilai Asset Ekstra Komptabel Keadaan Awal Tahun Anggaran 2021** sebesar **Rp. 246.607.090,00** **penambahan** sebesar **Rp. 10.761.850,00** dan **pengurangan** sebesar **Rp. 0,00** sehingga **Keadaan Akhir Asset Ekstra Komptabel** sebesar **Rp. 257.368.940,00** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Keadaan Awal Bidang Tanah senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Tanah** senilai **Rp. 0,00**.
- 2) Keadaan Awal Bidang Alat–Alat Besar senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat–Alat Besar** senilai **Rp. 0,00**.
- 3) Keadaan Awal Bidang Alat–Alat Angkutan senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat–Alat Angkutan** senilai **Rp. 0,00**.
- 4) Keadaan Awal Bidang Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai **Rp. 1.078.000,00** tidak mengalami mutasi tambah dan kurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Bengkel dan Alat Ukur** senilai **Rp. 1.078.000,00**.
- 5) Keadaan Awal Bidang Alat Pertanian senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Pertanian** senilai **Rp. 0,00**.
- 6) Keadaan Awal Bidang Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai **Rp. 206.619.140,00** terdapat penambahan senilai **Rp. 9.239.450,00** dan tidak terdapat pengurangan, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Kantor dan Rumah Tangga** senilai **Rp. 215.858.590,00**.
- 7) Keadaan Awal Bidang Alat Studio dan Alat Komunikasi senilai **Rp. 8.775.000,00** mengalami mutasi tambah senilai **Rp. 1.522.400,00** dan tidak mengalami mutasi kurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Studio dan Alat Komunikasi** senilai **Rp. 10.297.400,00**.
- 8) Keadaan Awal Bidang Alat Kedokteran senilai **Rp. 4.526.500,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Kedokteran** senilai **Rp. 4.526.500,00**.
- 9) Keadaan Awal Bidang Alat Laboratorium senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Laboratorium** senilai **Rp. 0,00**.
- 10) Keadaan Awal Bidang Bangunan Gedung senilai **Rp. 9.948.950,00**. tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Bangunan Gedung** senilai **Rp. 9.948.950,00**.
- 11) Keadaan Awal Bidang Monumen senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Bidang Monumen** senilai **Rp. 0,00**.
- 12) Keadaan Awal Bidang Jalan dan Jembatan senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Bidang Jalan dan Jembatan** senilai **Rp. 0,00**.

- 13) Keadaan Awal Bidang Bangunan Air Irigasi senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Bidang Bangunan Air Irigasi** senilai **Rp. 0,00**.
- 14) Keadaan Awal Bidang Instalasi senilai **Rp. 4.950.000,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Bidang Instalasi** senilai **Rp. 4.950.000,00**.
- 15) Keadaan Awal Bidang Jaringan senilai **Rp. 9.729.500,00**. terdapat **mutasi tambah** senilai **Rp. 0,00** dan **tidak terdapat mutasi kurang** sehingga **Keadaan Akhir Bidang Instalasi** senilai **Rp. 9.729.500,00**.
- 16) Keadaan Awal Bidang Buku dan Perpustakaan senilai sebesar **Rp. 980.000,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Bidang Buku dan Perpustakaan** senilai **Rp. 980.000,00**.
- 17) Keadaan Awal Bidang Barang Bercorak Kebudayaan senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Barang Bercorak Kebudayaan** senilai **Rp. 0,00**.
- 18) Keadaan Awal Bidang Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang Sehingga **keadaan akhir Bidang Konstruksi Dalam Pengerjaan** senilai **Rp. 0,00**.

f. Penjelasan Aset Lain – Lain Ekstra Komptabel

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur **Jumlah Nilai Aset Lain – Lain Ekstra Komptabel Keadaan Awal Tahun Anggaran 2021** sebesar **Rp. 0,00** **memperoleh penambahan** sebesar **Rp. 600.000,00** dan **pengurangan** sebesar **Rp. 0,00** sehingga **Keadaan Akhir Aset Ekstra Komptabel** sebesar **Rp. 600.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Keadaan Awal Bidang Tanah senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Tanah** senilai **Rp. 0,00**.
- 2) Keadaan Awal Bidang Alat–Alat Besar senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat–Alat Besar** senilai **Rp. 0,00**.
- 3) Keadaan Awal Bidang Alat–Alat Angkutan senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat–Alat Angkutan** senilai **Rp. 0,00**.
- 4) Keadaan Awal Bidang Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Bengkel dan Alat Ukur** senilai **Rp. 0,00**.

- 5) Keadaan Awal Bidang Alat Pertanian senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Pertanian** senilai **Rp. 0,00**.
- 6) Keadaan Awal Bidang Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai **Rp. 600.000,00**. **Tidak** mengalami mutasi tambah dan kurang , sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Kantor dan Rumah Tangga** senilai **Rp. 600.000,00**.
- 7) Keadaan Awal Bidang Alat Studio dan Alat Komunikasi senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi tambah dan kurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Studio dan Alat Komunikasi** senilai **Rp0,00**.
- 8) Keadaan Awal Bidang Alat Kedokteran senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Kedokteran** senilai **Rp. 0,00**.
- 9) Keadaan Awal Bidang Alat Laboratorium senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Alat Laboratorium** senilai **Rp. 0,00**.
- 10) Keadaan Awal Bidang Bangunan Gedung senilai **Rp. 0,00**. tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Bangunan Gedung** senilai **Rp0,00**.
- 11) Keadaan Awal Bidang Monumen senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Bidang Monumen** senilai **Rp. 0,00**.
- 12) Keadaan Awal Bidang Jalan dan Jembatan senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Bidang Jalan dan Jembatan** senilai **Rp. 0,00**.
- 13) Keadaan Awal Bidang Bangunan Air Irigasi senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Bidang Bangunan Air Irigasi** senilai **Rp. 0,00**.
- 14) Keadaan Awal Bidang Instalasi senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Bidang Instalasi** senilai **Rp. 0,00**.
- 15) Keadaan Awal Bidang Jaringan senilai **Rp. 0,00** terdapat **mutasi tambah** senilai **Rp. 0,00** berupa penerangan jalan yang berada di UPT RSBD Pasuruan dan tidak terdapat mutasi kurang sehingga **Keadaan Akhir Bidang Instalasi** senilai **Rp. 0,00**.
- 16) Keadaan Awal Bidang Buku dan Perpustakaan senilai sebesar **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang sehingga **Keadaan Akhir Bidang Buku dan Perpustakaan** senilai **Rp. 0,00**.

- 17) Keadaan Awal Bidang Barang Bercorak Kebudayaan senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang, sehingga **Keadaan Akhir Bidang Barang Bercorak Kebudayaan** senilai **Rp. 0,00**.
- 18) Keadaan Awal Bidang Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami mutasi bertambah dan berkurang Sehingga **keadaan akhir Bidang Konstruksi Dalam Pengerjaan** senilai **Rp. 0,00**.

g. Penjelasan Akumulasi Penyusutan

Keadaan Awal Akumulasi Penyusutan senilai **Rp. 125.511.617.696,00**, terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. 122.920.238.527,00, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Tetap Rp. 257.723.059,00, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp. 2.333.656.383,00. Keadaan akhir Akumulasi Penyusutan senilai **Rp. 137.385.584.341,00**, terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. 134.297.783.168,00, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Tetap Rp. 389.581.294,00, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp. 2.698.219.879,00.

h. Penjelasan Utang

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur **Tahun Anggaran 2021 Nilai Utang Keadaan Awal** sebesar **Rp. 226.309.713,00**, terdiri dari Utang Belanja Air, Listrik, Telepon dan Internet, dan Pendapatan Diterima Dimuka, sedangkan saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 198.832.889,00**. Terdiri dari Utang Belanja Air, Listrik, Telepon dan Internet.

F. INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi akuntansi atau selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran, Laporan Operasional, neraca, dan catatan atas laporan keuangan terhadap pengelolaan anggaran / barang yang menjadi kewenangannya dibawah kendali Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekaligus selaku pengguna anggaran (PA) mendasarkan pelaksanaan tugasnya pada pedoman pelaksanaan tugas,

dokumen pelaksanaan anggaran serta pedoman penatausahaan keuangan SKPD tahun yang bersangkutan.

Dinas Sosial merupakan instansi teknis membidangi penanganan Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan operasionalnya tugas pokok mengacu pada pedoman atau petunjuk yang diterbitkan oleh daerah dan pusat. Kegiatan operasional dimaksud diantaranya dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Ketentuan perundang-undangan kaitannya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang kami sampaikan dimuka ditambah dengan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersifat spesifik baik tugas pokok di bidang Penanganan Kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan

Ketentuan perundang-undangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan mengalami penyempurnaan-penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan utamanya pengentasan masyarakat miskin di Jawa Timur sebagai berikut :

- a. Memberikan santunan kepada anak-anak terlantar, usia lanjut, penyandang cacat, anak cacat, tuna sosial, gelandangan, pengemis dan bekas narapidana serta mendorong peran masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan mereka.
- b. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada mereka yang berpotensi melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan.
- c. Memanfaatkan lahan yang ada di panti-panti sosial untuk kegiatan usaha produktif
- d. Pelatihan Manajemen, ketenagakerjaan dan kewirausahaan
- e. Pembinaan dan penyuluhan bahaya narkoba dan kesehatan reproduksi remaja meliputi seks, kehamilan, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS
- f. Peningkatan sarana dan prasarana pemberdayaan generasi muda.

G. PENUTUP

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dalam rangka merealisasikan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).

Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA ditetapkan atau disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Rencana Kerja Anggaran yang telah dibahas oleh tim anggaran eksekutif yang disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Program dan Anggaran Sementara (PPAS) serta Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan dirinci pelaksanaannya dalam Anggaran Kas Belanja Pertriwulan.

Sasaran program dan kegiatan yang ingin dicapai telah tertuang dalam indikator sasaran yang tertuang dalam indicator sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran yang meliputi input , output dan outcome dengan harapan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran yang diinginkan.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam tahun 2021 mempunyai tugas yang cukup besar yaitu membantu gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Usaha Kesejahteraan sosial dan harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya yaitu upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan Kesejahteraan sosial.

Secara umum berdasarkan hasil penyerapan anggaran dapat dicapai realisasi capaian penyerapan sebesar **92,60%**, sehingga capaian kinerja keuangan dinyatakan efisien. Namun di lain pihak terjadi sisa anggaran sebesar **Rp. 30.068.617.719,00** atau **7,40%** yang merupakan sisa gaji dan tunjangan, sisa bansos serta sisa dari penawaran lelang atau sisa mati.

X. LAMPIRAN